

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KENOREJO DENGAN DESA TEPISARI KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ARIFFUDIN NUR FADLY ROSYID

NIM: C100180173

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**“Analisis Perbandingan Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
di Desa Kenokorejo dengan Desa Tepisari Kecamatan Polokarto
Kabupaten Sukoharjo”**

yang disusun oleh:

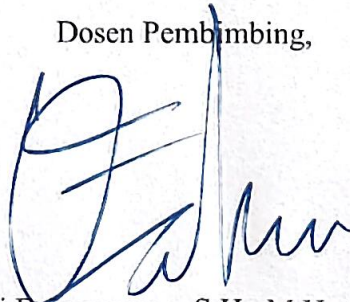
Ariffudin Nur Fadly Rosyid (NIM: C100180173)

telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 24 Juli 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M

NIDN/NUPTK. 0426099302

HALAMAN PENGESAHAN

“Analisis Perbandingan Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kenokorejo Dengan Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo”

Oleh: Ariffudin Nur Fadly Rosyid (NIM: C100180173)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal ..Selasa, 28 Juli 2026.....

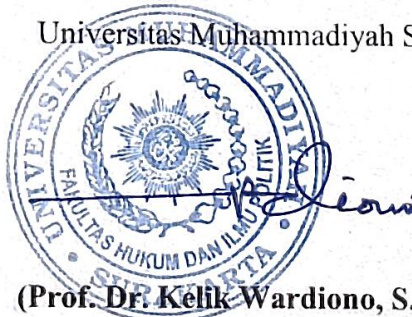
Dewan Penguji

- 1 Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M
(Ketua/Penguji 1)
- 2 Dr. Andria Luhur Prakoso, S.H, M.Kn.
(Penguji II)
- 3 Labib Muttaqin, S.H, M.H.
(Penguji III)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)
NIDN 00261226801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariffudin Nur Fadly Rosyid

NIM : C100180173

Alamat : Majon, RT 03, RW 05, Kemasan, Polokarto, Sukoharjo, Jawa

Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang merupakan karya tulis saya ini merupakan karya tulis asli yang belum pernah diajukan guna mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil pemikiran, kesimpulan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Surakarta, 19 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan



Ariffudin Nur Fadly Rosyid
NIM C100180173

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan segala kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu saya, terima kasih atas segala doa, semangat, nasehat, motivasi, pengorbanan dan cinta yang tidak pernah berhenti sampai sekarang.
3. Teman-teman seperjuangan semua yang saya sayangi dan banggakan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan HidayahNya. Sholawat serta salam semoga tercerah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KENOKOREJO DENGAN DESA TEPISARI KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO”.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tentu Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi bagi Penulis selama kuliah.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Surakarta, Agustus 2026

Penulis

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan optimalisasi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD pada kedua desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif komparatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua BPD, anggota BPD, kepala desa, serta pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen desa, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan pelaksanaan fungsi BPD pada kedua desa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Pada fungsi legislasi, kedua BPD telah melaksanakan pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa bersama kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun Desa Kenokorejo memiliki jumlah produk hukum desa yang lebih banyak. Pada fungsi penyaluran aspirasi, kedua desa telah menyediakan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, namun Desa Tepisari memiliki sistem yang lebih terstruktur melalui perwakilan BPD di setiap wilayah serta forum rutin pada tingkat RT dan RW. Pada fungsi pengawasan, kedua BPD telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kepala desa, dengan Desa Tepisari menerapkan pengawasan yang lebih intensif melalui kehadiran rutin anggota BPD di kantor desa. Adapun faktor penghambat di Desa Kenokorejo meliputi keterbatasan anggaran, komunikasi antaranggota yang dipengaruhi kesibukan masing-masing, serta potensi kurang optimalnya transparansi dalam pelaksanaan pengawasan. Sementara itu, di Desa Tepisari hambatan relatif lebih kecil karena didukung komunikasi kelembagaan yang baik, meskipun masih terdapat keterbatasan akses BPD terhadap sebagian informasi administrasi keuangan desa.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, fungsi BPD, pemerintahan desa, optimalisasi, pengawasan

ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD) is an institution that plays a strategic role in the administration of village government through its legislative functions, the channeling of community aspirations, and the oversight of the village head's performance, as stipulated in Law No. 6 of 2014 on Villages. Optimizing the implementation of these functions is a key factor in realizing democratic, participatory, and accountable village governance. This study aims to analyze a comparison of the optimization of the Village Consultative Body's functions in Kenokorejo Village and Tepisari Village, Polokarto Subdistrict, Sukoharjo Regency, as well as to identify the factors hindering the implementation of the BPD's functions in both villages. This study employs an empirical legal research method with a descriptive-comparative approach. Primary data were obtained through interviews with the BPD chairperson, BPD members, village heads, and relevant parties, while secondary data were obtained through a literature review of laws and regulations, village documents, and relevant literature. The data were analyzed qualitatively by comparing the implementation of BPD functions in both villages based on applicable legal provisions. The research findings indicate that the BPDs in Kenokorejo Village and Tepisari Village have generally performed their functions well. Regarding legislative functions, both BPDs have conducted discussions and reached agreements on draft village regulations with the village heads in accordance with applicable laws and regulations, although Kenokorejo Village has produced a greater number of village legal instruments. Regarding the function of channeling public aspirations, both villages have established mechanisms for gathering community input; however, Tepisari Village has a more structured system through BPD representatives in each sub-district as well as regular forums at the RT and RW levels. In terms of oversight, both BPDs have conducted monitoring and evaluation of the village heads' performance, with Tepisari Village implementing more intensive oversight through the regular presence of BPD members at the village office. Constraints in Kenokorejo Village include budget limitations, communication among members hindered by their respective busy schedules, and the potential for suboptimal transparency in the oversight process. Meanwhile, in Tepisari Village, these obstacles are relatively minor due to strong institutional communication, although the BPD still faces limited access to some village financial administrative information.

Keywords: Village Consultative Body, functions of the BPD, village government, optimization, oversight

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Optimalisasi.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Fungsi.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Desa.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa.....	29
E. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Profil Desa	39
B. Perbandingan Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenokorejo dengan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	45

C. Faktor Yang Menghambat Terlaksananya Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Secara Optimal di Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83